

**ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP PENYELENGGARAAN
ASIAN GAMES DI KOTA PALEMBANG**

PROPOSAL

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Fitri Larassaty
NPM : 1405180019
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FITRI LARASSATY
N P M : 1405180019
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP
PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES DI KOTA PALEMBANG
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. PRAWIDYA HARIANI R.S., S.E., M.Si

Penguji II

HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si

Pembimbing

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FITRI LARASSATY
N.P.M : 1405180019
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP
PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES DI KOTA
PALEMBANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 8 Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. DADUTI, SE, MM, M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP RENCANA PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES DI KOTA PALEMBANG”**

Dalammenulisskripsiini, penulisbanyakmengalamikesulitanakarenaterbatasnyapengetahuan, pengalaman, danbuku yang relevan.Namunberkatbantuanandanmotivasibaikdaridosen, keluargadanteman-temansehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisaninidengansebaikmungkin.Olehkarenaitupenu lismengucapkanterimakasih yang sebesar-besaryateristimewauntukkedua orang tuapenulisyaitu**IbundaRita Nasution**tercinta yang telahmendididkanmembimbingpenulisdenganpenuhkasihsayangsertabantuanmaterilsehinggapenu lisdapatmenyelesaikankuliah di FakultasEkonomiUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisjugamenyampaikan rasa hormatdanterimakasih yang sebesar-besaryakepadasemuapihak yang telahmemberikanbantuanandibimbinganyaitukepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.Ap. selakuRektorUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.
2. BapakH. Januri, SE, MM,M.SiselakuDekanFakultasEkonomiUniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.

3. IbuDr. PrawidyaHariani R.S, S.E, M.Si. selakuKetua Program StudiEkonomi Pembangunan UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.
4. IbuDra. Hj. LailanSafinaHasibuan, M.Si. selakudosenpembimbing yang selalumembantudanmemotivasisayadalampenyelesaian proposal skripsiini.
5. SeluruhDosen FE UMSU program studiEkonomi Pembangunan yang telahmemberikanilmupengetahuankepadapenulisselamamenjalanistudi di bangkuperkuliahahan.
6. Buatsahabatseperjuangan yang relaberbagiilmu, materi, tawa, tangis,yaituRizkyAnanda, WindyaSuci Octavia, NurulFadhilah, Bella Avista. Semogakitamenjadi orang-orang suksesseuaiimpiandancita-citakita.
7. Sahabatseperjuangan di kelasyang luarbiasa , EP-B Pagi yang semagatnyaluarbiasabisabertahanmempertahankansusahnyamenjadimahasiswa di jurusanEkonomiPembangunan.
8. Best Longorkusahabat yang luarbiasa, adaGuslindaSitorusdanRabbiyatulAdawiyah, kalian sangathebatdandsemogakelakketikakitaberkumpulembali, semogakitamenjadi orang-orang yang suksesseuaiimpiandankhayalankitaselamaini.
9. Terimakasihbuattemanseperjuangan di BPH HMJ IESP 2016-2017.
10. TerimakasihbanyakuntukkakaksepuputercomeINurulRamadhaniPanjaitanatassegalabantuann yadalamsegidoadansegiapapun.
11. TerimakasihkhususuntukabangArief yang lagiberjuang di stabatsang motivator dansosok yang banyakmemberikansemangatdaninspirasidalamhidupsaya.
12. Terimakasihbuatkawan main saya yang super duperhebohada Nova Aulia, CiciAdha, Isla Rayana.

13. Terimakasihbuatibu yang paling cantikJunaidahSpd, danseluruhkeluargabesarAlm.
TokMansyurNasutiondannenekMuniahNapitupulu yang enggakbisadisebutinsatupersatu.

14. Semuapihak yang telahmembantuterselesaikannyaSkripsiinidantidakbisasayasebutkansatu –
persatu.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah
SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik
saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan
ke depan. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin*

Medan , September 2015

Penulis,

FITRI LARASSATY
NPM: 1405180019

ABSTRAK

ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP RENCANA PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES DI KOTA PALEMBANG

Abstrak. Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggara Asian Games XVIII pada tahun 2018 menggantikan Vietnam yang mengundurkan diri karena kesulitan dana. Tumbuh harapan yang kuat untuk menggapai sukses seperti ketika menjadi tuan rumah Asian Games IV pada tahun 1962. Meskipun demikian, Indonesia harus realistis dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki pada saat ini. Tuntutan utama masyarakat adalah para atlet Indonesia dapat berprestasi lebih baik daripada prestasi yang dicapai dalam Asian Games sebelumnya. Capaian lain yang menjadi harapan masyarakat adalah Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik. Asian Games XVIII pada tahun 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang diharapkan juga dapat memberdayakan industri olahraga di Indonesia. Melalui pesta olahraga empat tahunan ini, industri yang lain, seperti perhotelan, transportasi, pariwisata, dan sarana-prasarana dapat meningkatkan eksistensinya dengan menjual produk, jasa, dsb. Berkembangnya indikator ekonomi sebelum terselenggaranya *event* olahraga internasional dan menganalisis pembangunan infrastruktur dan transportasi akan mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang pada gilirannya dapat menyejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi olahraga diharapkan sekali dapat meningkatkan perekonomian daerah yg berdampak pada perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan data analisis deskriptif untuk melihat dampak ekonomi di kota Palembang.

Kata Kunci: dampak ekonomi, olahraga, event

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i-ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang	1
1.3 Identifikasi Masalah	7
1.4 Batasan Masalah.....	7
1.5 Rumusan Masalah	8
1.6 Tujuan Penelitian	8
1.7 Manfaat Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis	
2.1.1 Teori Pembangunan	10
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.3.1 Teori Makro	17
2.1.3.2 Teori Mikro	24
2.1.3 Teori Investasi	26
2.2 Peneliti Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional	30
3.3 Tempat Penelitian	31
3.4 Waktu Penelitian.....	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisa Data	23

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Gambaran Umum Objek penelitian	37
4.1.1 Kondisi Geografis.....	37
4.1.2 Kependudukan.....	41
4.1.3 Ketenagakerjaan	41
4.1.4 Kondisi Pendidikan dan kesehatan	43
4.2 Analisis Deskriptif	44
4.2.1 Analisis Perkembangan indikator ekonomi	44
4.2.1.1 Inflasi	44
4.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto	45
4.2.2 Analisis Perkembangan infrastruktur dan transportasi	49
4.2.2.1 Infrastruktur dan transportasi	49

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	28
Tabel 1.2	30
Tabel 4.1	40
Tabel 4.2	42
Tabel 4.3	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	20
Gambar II-2.....	22
Gambar II-3	23
Gambar II-4	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang sangat kompleks, artinya bahwa hubungan internasional tidak hanya berbicara mengenai satu topic saja tetapi banyak seperti permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial dan lain – lain. Bahkan saat ini olahraga telah merefleksikan diri menjadi salah satu kajian dalam hubungan internasional. Hal tidak hanya menjadi salah satu bidang olahraga saja tetapi menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Olahraga dapat mewakili kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Dalam beberapa kasus, secara tidak langsung olahraga telah dijadikan barometer ideal dalam hubungan internasional, ketegangan antar bangsa, serta ambisi nasional. Sebagai contoh negara-negara yang baru merdeka langsung mencari legitimasinya dengan mengajukan syarat menjadi anggota Asian Games, yang pada kenyataannya jumlahnya lebih banyak daripada anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Piala Asian Games merupakan suatu ajang olahraga empat tahun sekali yang diadakan di benua ASEAN. Tahun 2018 mendatang Indonesia akan menjadi penyelenggara ajang olahraga Asian Games XVII. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan ajang olahraga terbesar se-Asia.

Kehadiran Asian Games memang harus dilihat sebagai suatu hiburan dari sebuah kompetisi olahraga profesional luar negeri dimana memang dari awalnya sudah dikemas sebagai komoditas *multiimpact*. Asian Games ini sendiri telah menjadi berkah dan kebanggaan tersendiri bagi Negara tuan rumah. *Event* ini dipastikan akan menarik perhatian dunia pencinta olahraga dimana pun berada. Dan kota

palembangsebagai salah satu tuan rumah tentunya akan menjadi sorotan masyarakat internasional tidak hanya dalam skala local tetapi global. Dampak positif bagi penyelenggara juga tidak akan berhenti sampai perhelatan Piala Asiam Games usai, bahkan dalam waktu lama *branding* Asian Games masih akan menjadi daya jual tinggi bagi kota terkait. Diperkirakan dampak Asain Games ini akan semakin jelas terlihat bagi kota penyelenggara berselang dari waktu penyelenggaraan *event* tersebut tepatnya tahun 2018.Tidak hanya itu, *event* ini tentunya akan meningkatkan *prestige* kota tuan rumah dan berdampak juga terhadap nasionalisme dan kebersamaan masyarakat dengan pemerintah dalam mensukseskan *event* tersebut. Maka tidak heran jika menjadi tuan rumah penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional menjadi incaran bahkan rebutan dari setiap negara di ASEAN. (yohana,2012)

Sedikitnya terdapat poin utama yang akan menguntungkan bagi Negara penyelenggara Asian Games. Jika dilihat dari kepentingan Negara. Asian Games merupakan ajang yang ditunggu tunggu yang akan mampu menaikkan status dan citra di dunia internasional. *Prestige*, status, dan citra memang bukan satu-satunya indikator yang menjadi sebuah Negara dihormati dan disegani. Dalam hal ini kita dapat mengacu pada kebutuhan, citra Negara positif sebuah Negara akan berdampak positif pada sektor sektor seperti pembangunan infrastruktur, industri, dampak sosia, serta pariwisata. Misalnya minat investor untuk berinvestasi di Negara yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games, hal ini akan meningkatkan ekonomi.

Seiring dengan kondisi di atas olahraga pun dimanfaatkan sebagai *instrumentsoft power*. Sebagai salah satu isu yang muncul dalam dinamika hubungan internasional, olahraga telah menjadi isu *low politics* dan bahkan telah menjelma menjadi sarana yang baik dalam mengembangkan hubungan antar

bangsa. Sebuah penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat dilihat sebagai upaya pencapaian kepentingan Nasional negara penyelenggaraan.

Infrastruktur Modal fisik (*physical capital*) dan sumber daya manusia (*human capital*) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan modal fisik sangat terkait dengan ketersediaan dana investasi. Pada kasus perekonomian Indonesia, meski kinerja pertumbuhan belum mencapai rata-rata prakrisis Asia, namun fundamental perekonomian yang cukup kuat, disertai dengan perbaikan risiko makro dan mikro perekonomian, telah mendorong berbagai lembaga internasional untuk memberikan penilaian positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hasilnya, Indonesia kembali dikategorikan pada peringkat layak investasi (*investment grade*) oleh beberapa lembaga internasional. *Plotting* sederhana menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai hubungan yang searah dengan pertumbuhan akumulasi stok kapital atau investasi.

Asian Games yang akan dilaksanakan tahun 2018 diharapkan menjadi ajang promosi yang baik bagi Indonesia yang sudah banyak mengalami perubahan posisi sosial-ekonomi. Dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia khususnya Palembang dan Jakarta, diharapkan wajah Indonesia tampil lebih maju akan hadir di tahun 2018. Melengkapi pusat perbelanjaan, pusat bisnis, hotel, apartemen, jalan tol, serta pembangunan Light Rail Transit LRT di Palembang yang menghubungkan bandara SMB II sampai Jakabaring Sport City. Pada kondisi gencarnya pembangunan ini, kelompok masyarakat merasakan dampak dan kerugian.

Kondisi Palembang menjadi gersang dan cuaca semakin panas. Puluhan pohon terpaksa ditebang akibat dari pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) di kota Palembang sepanjang 22,5 kilometer. Hal ini dilakukan karena keberadaan pohon tepat mengenai tiang dari penunjang rel kereta tersebut. Tidak hanya pohon yang menjadi imbas, taman-taman bahkan lampu jalan pun terpaksa dicabut. Selain mengakibatkan gersang dan cuaca semakin panas, pohon-pohon yang ditebang mengakibatkan berbagai polusi udara sehingga dapat mengganggu kesehatan para pengemudi kendaraan bermotor maupun penduduk sekitar yang tinggal di dekat pembangunan tersebut.

Pembangunan LRT yang menyebabkan kemacetan di Palembang semakin meningkat. Kemacetan ini terjadi akibat penyempitan badan jalan pada pembangunan LRT. Kemacetan yang dirasakan oleh masyarakat kota Palembang baik di waktu pagi, siang dan sore sangatlah merugikan. Selain menyita banyak waktu di perjalanan, kemacetan juga dapat mengakibatkan aktivitas-aktivitas yang lain terhambat. Kemacetan ini dapat dihindari dengan adanya jalur alternatif yang dapat dilalui masyarakat. Dan masyarakat diharapkan untuk tertib dan tidak saling mendahului saat melintasi zona pembuatan LRT.

Kondisi jalan yang rusak yang diakibatkan proses pengerjaan LRT, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya. Pasalnya, selain memicu kemacetan, kondisi jalan akibat pembangunan juga dapat mencelakakan pengendara yang melintas, akibat pemancangan tiang, yang menyebabkan ruas jalan bergelombang dan membuat akses jalan rusak parah..Dalam hal ini pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak pembanguan, agar selama pengerjaan tidak merusak ruas jalan dan memberikan kenyamanan pengendara untuk melintas di ruas jalan tersebut.

Pembangunan mall, pelayanan kesehatan, LRT, hotel serta pusat bisnis dapat menyebabkan banjir. Pembangunan fasilitas masyarakat memang membawa dampak positif yakni menambah investasi bagi SumSel dan membuka lapangan pekerjaan baru, namun disisi lain hal ini dapat menambah titik kemacetan dan titik banjir baru. Pembangunan fasilitas dapat saja dilakukan di kawasan daerah yang agak jauh dari pusat misalnya di daerah tanjung si api api, selain menghindari banjir, pembangunan di daerah seperti itu juga dapat menghidupkan daerah tersebut. Dan dapat di lihat bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan ini kebijakan yang dibuat justru lebih bersifat bisnis dibanding kepentingan publik atau sosial. Sehingga terkadang tidak memikirkan dampak yang di terima masyarakat kedepannya.

Diacara sea games pada tahun 2011. Dimana banyak petinggi-petinggi Negara yang melakukan tindak korupsi sehingga dengan adanya pembangunan fasilitas pendukung bagi acara Asian Games 2018 contohnya seperti sarana transportasi LRT ditakutkan dijadikan ladang atau sumber yang dapat membuat sejumlah oknum pemerintahan tertentu maupun pelaksana event ini untuk melakukan korupsi, bila hal ini terjadi maka kerugian besar pada anggaran pembangunan daerah dan terhambatnya proses penyelesaian berbagai pembangunan seperti LRT yang dibicarakan tadi

Dipilihnya kota Palembang sebagai tempat penyelenggara selain Jakarta tentu bukan tanpa alasan. Selain karena pemerataan kesempatan, Palembang dipilih karena komitmen pimpinan daerah dan didukung oleh kesiapan infrastrukturnya. Meski penyelenggaraan Asian Games dilakukan di dua kota,

penyelenggaranya tetap ada dalam koordinasi panitia pusat yang disebut *Indonesia South East Asian Games Organizing Committee (INASOC)*.

Palembang adalah salah satu dari dua kota tuan rumah Asian Games 2018. Ajang Asian Games. Selama berlangsungnya *event* olahraga akbar se-Asean ini, negara atau kota tuan rumah selalu mengalami peningkatan yang positif mulai dari pembangunan infrastruktur, industri pariwisata, hingga tingkat pengangguran. Berbagai persiapan pun tengah dilaksanakan untuk menyambut acara ini.

Pemerintah melalui Pemkot Palembang dan Jakarta telah melakukan sensus ekonomi penduduk di mana tujuan dari sensus ekonomi ini mengetahui bagaimana ekonomi masyarakat yang ada di Kota Palembang maupun Jakarta khususnya sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 dimulai dan nantinya akan dibandingkan setelah Asian Games 2018. Menurut data BPS Februari 2017, ada peningkatan wisatawan mancanegara (*wisman*) sebesar 20,91 persen dibandingkan bulan Januari 2017 di kota Palembang. Peningkatan ini disebabkan karena makin terkenalnya Palembang di negara asing karena akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Wisatawan mancanegara yang datang ke Palembang kebanyakan berasal dari Malaysia dan Singapura yang di mana mereka adalah negara paling dekat dengan kota Palembang dan juga peserta dari Asian Games 2018.

Pelaksanaan Asian Games yang tinggal menghitung bulan itu juga berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Sumbernya bisa berasal dari *sponsorship*, hak siar televisi, maupun penjualan *merchandise* seperti kaos dan maskot hingga suvenir. Industri pariwisata pun diprediksi akan bergairah dengan *event* tersebut. Apalagi perilaku wisatawan Asia berbeda dengan Eropa.

Wisatawan Asia dikenal mau mencoba apa pun, berani makan di pinggir jalan, hingga dikenal sangat gila belanja. Oleh karena itu, para pelancong diprediksi tidak hanya ingin menghabiskan waktu di arena pertandingan, tapi juga berkeinginan menjajal wisata belanja dan wisata kuliner, hingga wisata sejarah. Berbeda dengan wisatawan asal Eropa yang terkadang lebih suka berdiam di hotel dan membaca buku.

Selain itu, pelaksanaan Asian Games juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja *part time* (sukarelawan). Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyebutkan dibutuhkan sebanyak 35 ribu sukarelawan yang akan ditempatkan di Jakarta, Palembang dan kota pendukung lainnya. Para sukarelawan ini nantinya akan diberi uang saku harian selama pelaksanaan Asian Games. Berkaca dari pengalaman selama ini, ajang sebesar Asian Games potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menengok penyelenggaraan Asian Games sebelumnya, ada keuntungan ekonomis yang bakal diperoleh tuan rumah. Pertumbuhan Ekonomi dalam kaitannya dengan Asian Games diperkirakan akan meningkat di atas 10 persen, dan membuat pasar modal Indonesia menjadi semakin baik, selain itu seiring berjalannya waktu Asian Games akan mempengaruhi menguatnya rupiah. Hal ini juga akan membawa dampak baik bagi perekonomian Indonesia.

Pemprov Sumatera Selatan pun turut berbenah menyambut Asian Games 2018. Belanja modal sebesar Rp 20 triliun disiapkan pemerintah pusat untuk membangun sarana prasarana venue yang ada di kawasan Jakabaring Spor City (JSC) serta infrastruktur pendukung lainnya di kota Palembang. Infrastruktur tersebut antara lain pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya (Palindera) dan

Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung), pembangunan *flyover* dan Jembatan Musi IV serta VI, serta Light rail transit (LRT). Belanja modal yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut memang tidak akan mencapai titik impas saat event Asian Games usai, tetapi manfaatnya dapat digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Seperti wisma atlet yang nantinya akan digunakan sebagai apartemen.(*Vanny* ,2016).

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis memilih judul : **ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP RENCANA PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES DI KOTA PALEMBANG**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kemacetan di Palembang akibat pembangunan *Light Rail Transit* (LRT)
2. Banyaknya jalanan bagi masyarakat di Palembang mengalami kerusakan akibat pembangunan infrastruktur.
3. Akibat pembangunan *Light Rail Transit*(LRT)maka puluhan pohon harus ditebang dan hal ini mengakibatkan kondisi di Palembang menjadi panas dan gersang.

1.3 Batasan Masalah

Dengan banyaknya permasalahan yang telah dibahas diatas serta mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki penulis dari segi waktu, biaya, tenaga, pengetahuan dan refrensi dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis akan

memberikan batasan pada penelitian yaitu dampak ekonomi terhadap pembangunan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan Asian Games di Palembang tahun 2018.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkembangan pembangunan indikator ekonomi sebelum terselenggaranya Asian Games di Palembang ?
2. Bagaimanakah perkembangan pembangunan sarana infrastruktur kota dan sarana transportasi di Palembang sehubungan akan diselenggarakannya Asian Games ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perkembangan indikator ekonomi sebelum terselenggaranya Asian Games di Palembang.
2. Untuk menganalisis perkembangan pembangunan sarana infrastruktur kota dan sarana transportasi di Palembang sehubungan akan diselenggarakannya Asian Games.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan nasional maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1. Akademik

- a. bagi penulis, hasil penelitian ini memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan pengaruh pembangunan infrastuktur di Palembang.
- b. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa berapa banyak anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur..
- c. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian.

2. Non Akademik

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi dalam membangun infrastruktur.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan

Pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses perbaikan dari suatu masyarakat yang berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sedangkan secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi dari struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat dari peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di berbagai sektor. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006:28).

Konsep pembangunan merupakan proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu (Todaro dan Smith, 2011:6). Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang

berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income* – GNI) per kapita “riil” sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan – seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro dan Smith, 2011:16).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro dan Smith, 2011:17).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran. Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19)

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

a. Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

b. Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah

dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.”

c. Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2011:27):

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok.
- 2) Peningkatan standar hidup.
- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Adam Smith) Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan *laissez-faire*, dan

merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Dalam bukunya *An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nation* (1776) ia menemukan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

a. Pertumbuhan Output Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

(1) Sumber daya alam (faktor produksi tanah)

(2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk)

(3) Stok kapital yang tersedia. Sumberdaya alam merupakan faktor pembatas (batas atas) dari pertumbuhan ekonomi.

Selama sumberdaya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan maka yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumberdaya manusia (tenaga kerja) dan stok kapital. Namun, jika sumberdaya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya (dieksploitir) atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumberdaya alam telah dicapai maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap mempunyai peranan yang pasif di dalam pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat, berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik (Yoseph Schumpeter), dalam bukunya *The Theory of Economics Development* menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurutnya pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuos).

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bawa untuk perkembangan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional. Yoseph Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasikan barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Merekalah yang menciptakan inovasi dan pembaharuan dalam perekonomian. Pembaharuan yang diciptakan para pengusaha itu dalam bentuk (Suryana, 2000) :

- 1) Memperkenalkan barang baru.
- 2) Menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang.
- 3) Memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru.
- 4) Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru.
- 5) Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri.

Menurut teori Schumpeter, semakin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat dan pada akhirnya akan terjadi keadaan yang tidak berkembang (stationary state). Namun, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal dan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, sumber daya alam, luas pasar atau pangsa pasar. Adanya perkembangan teknologi, menurut pandangan Neo-Klasik merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional, yang dimaksud dengan perkembangan teknologi dalam teori ini adalah penemuan-penemuan baru yang relatif lebih bersifat penghematan buruh sehingga dengan adanya kemajuan teknis akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang modal. Proses perkembangan ekonomi menurut teori ini adalah sebagai hasil dari hubungan harmonis antara faktor internal dan faktor eksternal ekonomi.

Faktor internal ekonomi timbul karena adanya kenaikan skala produksi sebagai akibat adanya efisiensi (hasil dari adanya mesin-mesin baru, spesialisasi, pasar yang lebih luas, dan manajemen yang lebih baik), sedangkan eksternal ekonomi timbul sebagai akibat adanya perkembangan industri yang saling ketergantungan dan komplementer dari berbagai sektor produksi dalam perekonomian.

Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi nasional. Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akumulasi kapital sangat berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

b. **Pertumbuhan Penduduk** Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010).

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

2.1.3.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah.

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1999):

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- c. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pembelian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya: pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1) Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus

menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto:2001).

2) Teori Adolf Wagner

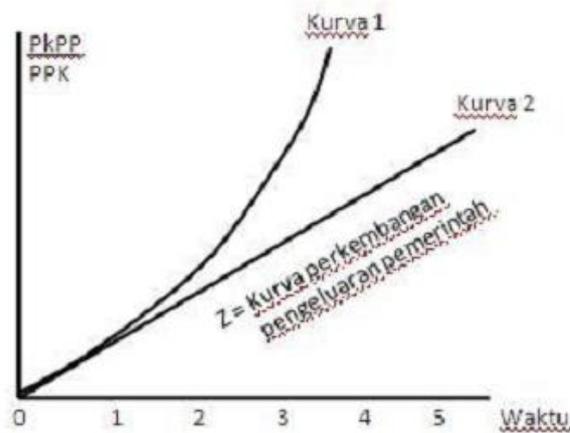
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto:2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PP_kP}{PPK1} < \frac{PkPPn}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn} \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana: PP_kP = Pengeluaran pemerintah perkapita
 PPK = Pendapatan perkapita (GDP/jlh penduduk)
 $1,2,\dots,n$ = jangka waktu (tahun)

Gambar II-1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber: Boediono, 1999

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

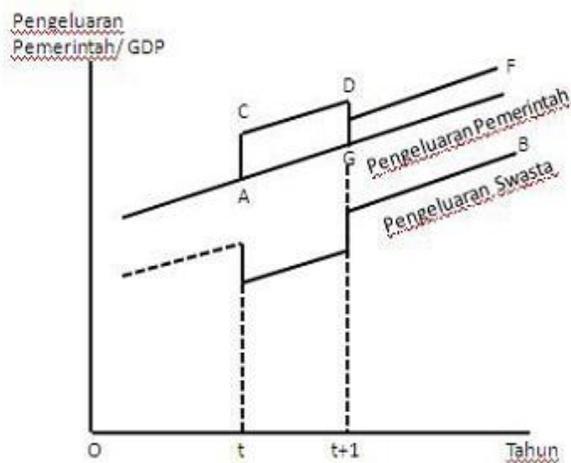
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut.

Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini.

Gambar II-2
Kurva Peacock dan Wiseman



Sumber: Boediono, 1999

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD.

Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G . Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.

Gambar II-3

Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave



Sumber: Boediono, 1999

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

4) Teori Batas Kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.3.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesoebroto:2001).

1) Penentuan Permintaan

$$U^i = f(G, X) \dots\dots\dots(2-4)$$

Dimana: U = Fungsi Utilitas
i = Individu, 1, 2, ..., m
G = Vektor barang pemerintah
X = Vektor barang swasta

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

2) Penentuan Tingkat Output

$$U_p = g(X, G, S) \dots\dots\dots(2-5)$$

Dimana: U_p = Fungsi Utilitas
S = keuntungan yang diperoleh politisi
G = Vektor barang pemerintah
X = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots\dots\dots(2-6)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots\dots\dots(2-7)$$

- Dimana: P = Vektor harga barang swasta
X = Vektor barang swasta
Bi = Basis pajak individu 1
Mi = Total pendapatan individu 1
T = Tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*)

2.1.3 Pengertian Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari $PDB = C + I + G + (X-M)$.

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4)

Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

2.1.4 Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, *Sollow* dan *Swan* memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).

2. Teori Harrod-Domar. *Harrod-Domar* mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk

menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

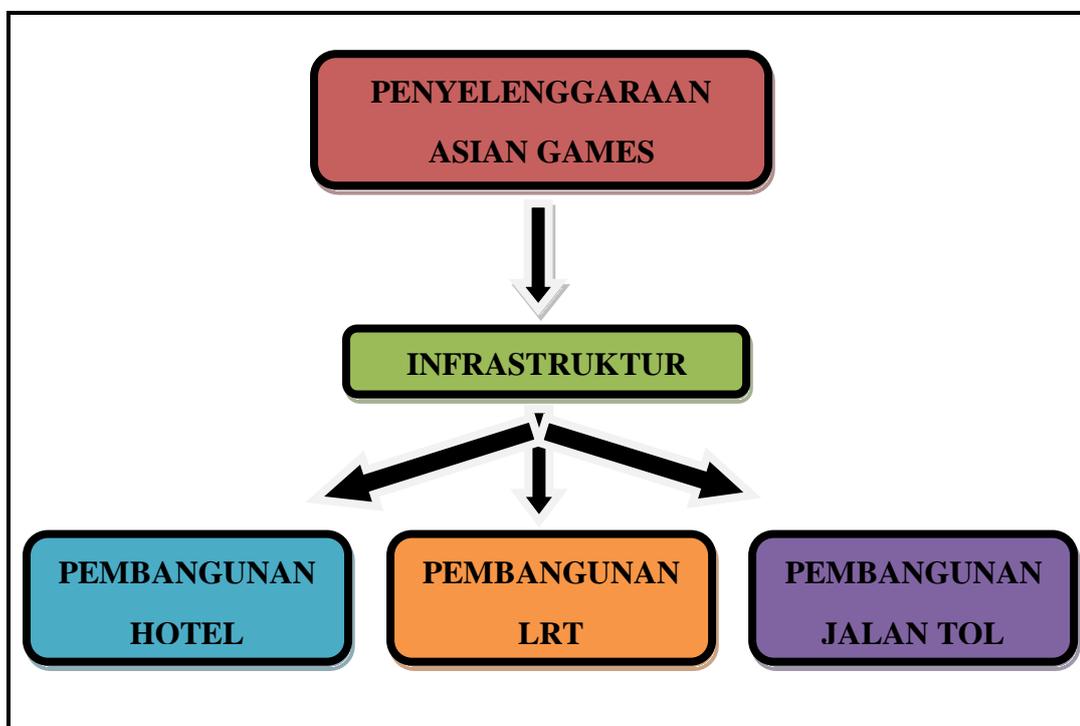
No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tanjung Hapsari, SE (2011)	OLS	Dependen Pertumbuhan ekonomi Independen	Jalan sangat mempengaruhi pertumbuhan
2.	Analisis kepentingan Indonesia Dalam Penyelenggaraan ASEAN Games 2018 RS Abdul (2016)	Deskriptif		Olahraga sebagai Instrumen dalam kepentingan Indonesia

3.	Dampak Penyelenggara <i>EVENT</i> Piala Eropa 2012 (UEFA EURO) Terhadap Ekonomi dan Politik Ukraina	Deskriptif		Sepak bola salah satu cabang olahraga yang paling banyak menarik perhatian masyarakat seluruh dunia.
	Yohana (2012)			

2.3 Kerangka Konseptual

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap sangat mempengaruhi pembangunan Infrastruktur yaitu: (1) Pembangunan jalan tol, (2) Pembangunan *Light rail Transit* (LRT), (3) Pembangunan Hotel,. Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

Gambar II-4 : Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis yang berusaha menggambarkan keadaan transportasi, infrastruktur, serta akomodasi yang disediakan Kota Palembang dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian yang bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Tipe penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang penulis teliti serta dapat menghubungkan dengan konsep yang dipakai.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel yang digunakan untuk memuat suatu sifat-sifat dari variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

Tabel 3-1

Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Sumber
Infrastruktur (I)	Merupakan salah satu dari tiga jenis publikasi hasil pendekatan Potensi Desa (Podes). Infrastruktur terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan akomodasi, sosial, dan pariwisata.	Badan Pusat Statistik www.bps.go.id
Transportasi (Tp)	Ada beberapa jenis transportasi yaitu: angkutan udara, angkutan laut, dan angkutan darat.	Badan Pusat Statistik www.bps.go.id
Akomodasi (Akd)	Setiap orang yang melakukan perjalanan kesuatu negara diluar negara temoat tinggalnya kurang dari satu tahu, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya) selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang didatangi.	Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dengan melihat data pembangunan infrastruktur Kota Palembang serta data lain yang mendukung penelitian ini dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

3.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 4 bulan yaitu Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berdasarkan kurun waktunya, data yang digunakan adalah data *time series* dengan periode waktu tahun 2014 sampai dengan 2017. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari publikasi resmi yang berasal dari: Badan Pusat Statistika, dan data dalam bentuk buku, jurnal ataupun *website* yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*Library Reasearch*), dengan cara melakukan pengambilan data dari situs-situs resmi seperti Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan situs yang mendukung lainnya dengan runtut waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

3.7 Tahapan Analisis

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis, ditetapkan, diuraikan, dan didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar alur sebab-sebab/konteks-konteks didalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

3.7.2 Teknik Analisa Data

Analisis data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan pengimplementasian data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

3.7.3 Analisis Perkembangan indikator Ekonomi Sebelum Terselenggara Asian Games di Kota Palembang

Menganalisis dampak 3 tahun sebelum terselenggaranya *event* akabar Asian Games terhadap perkembangan indikator ekonomi yang dirasakan kota Palembang sebagai tuan rumah.

3.7.4 Analisis Perkembangan Infrastruktur Kota dan Sarana Transportasi di Kota Palembang

Sejak ditunjuknya Palembang sebagai salah satu dari beberapa Kota Penyelenggara Asian Games 2018 karena Indonesia sebagai tuan rumah

penyelenggaraan Asian Games 2018 ini, maka banyak perubahan-perubahan yang dilakukan terutama pada infrastruktur yang semakin diperbaiki dengan pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, pembangunan LRT, pembangunan *Flyover* dan lainnya untuk mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Asian Games 2018 sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Palembang itu sendiri. dengan demikian adanya pelaksanaan Asian Games 2018 di Indonesia ini memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia terutama untuk perekonomian di beberapa Kota yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Asian Games 2018 ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

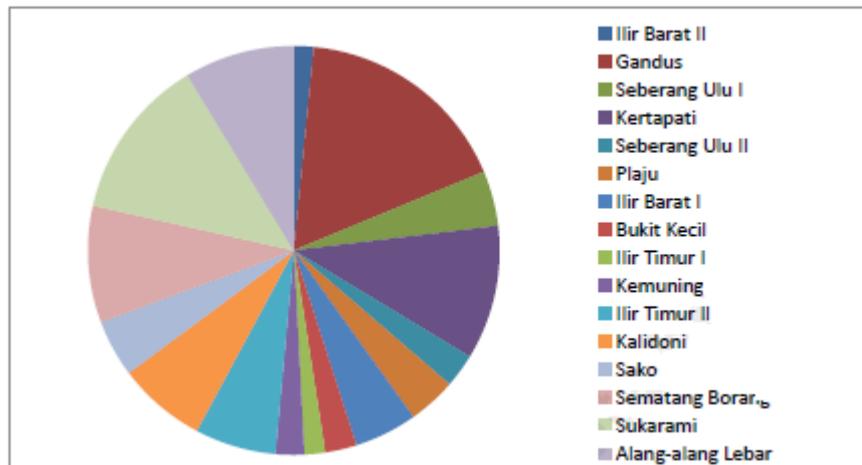
Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37'sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan, dan berdasarkan PP No. 23 tahun 1988 luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 40.061 Ha.

Wilayah administrasi Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan, luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Ilir Barat II (6,220 km²), Gandus (68,780 km²), Seberang Ulu I (17,440 km²), Kertapati (42,560 km²), Seberang Ulu II (10,690 km²), Plaju (15,170 km²), Ilir Barat I (19,770 km²), Bukit Kecil (9,920 km²), Ilir Timur I (6,500 km²), Kemuning (9,000 km²), Ilir Timur II (25,580 km²), Kalidoni (27,920 km²), Sako (18,040 km²), Sematang Borang (36,980 km²), Sukarami (51,459 km²) serta Alang- Alang Lebar (34,581 km²). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin , bagian selatan berbatasan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

Berikut ini adalah grafik luas wilayah Kecamatan dikota Palembang dalam persen

Grafik 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang

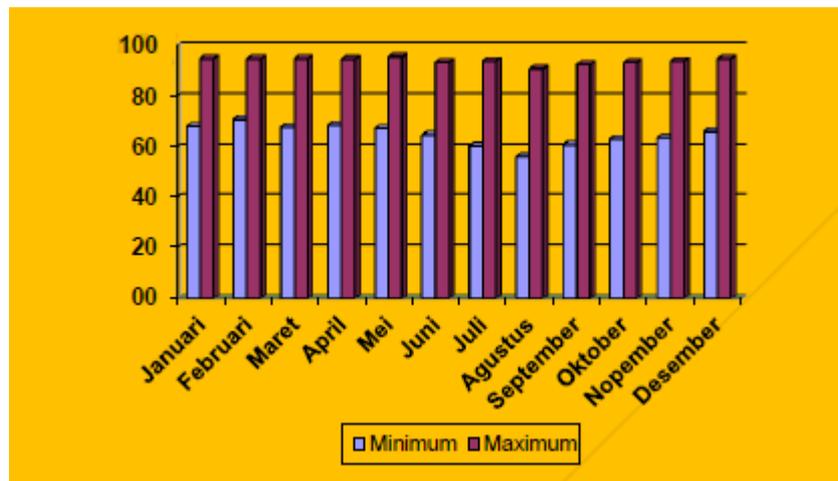


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa sanya luas wilyah menurut kecamatan di kota Palembang terluas ialah di kecamatan Gandus ialah sebesar 17,17% atau sebesar 60,78 km². Sedangkan luas wilayah menurut kecamatan di kota palebang yang paling kecil ialah kecamatan Ilir timur I yaitu hanya sebesar 1,62% atau 6,50 km2. Dan total luas wilayah kota Palembang yaitu sebesar 400,6%.

Dibawah ini grafik rata-tara kelembaban udara bulanan yang tercatat pada stasiun klimatologi katen Palembang dalam persen tahun 2016

Grafik 4.2
Rata-rata Kelembaban Udara Bulanan Yang Tercatat Pada Stasiun
Klimatologi Keten Palembang (persen) 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwasanya suhu udara di kota Palembang terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar $33,9^{\circ}\text{C}$ serta suhu udara minimum terjadi pada bulan September $24,2^{\circ}\text{C}$. Dengan demikian rata-rata suhu udara di Kota Palembang tertinggi ialah terjadi di bulan Agustus sebesar $28,3^{\circ}\text{C}$ sedangkan rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan februari sebesar $27,2^{\circ}\text{C}$.

Berikut ini adalah table kelembaban udara menurut bulan di kota Palembang tahun 2016 dalam persen

Table 4.1
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Palembang, 2016

Bulan/Month	Suhu Udara			Kelembaban Udara		
	Temperature (°C)			Humidity (%)		
	Maks Max	Min	Rata-rata Average	Maks Max	Min	Rata-rata Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	32,9	24,9	27,5	94,9	68,1	85,4
Februari/February	32,3	24,6	27,2	94,9	70,9	85,8
Maret/March	33,1	24,9	27,8	94,9	67,9	85,1
April/April	33,5	25,2	28,1	94,6	68,7	85,1
Mei/May	33,4	25,5	28,2	95,5	67,3	85,1
Juni/June	33,0	24,9	27,8	93,6	64,6	82,6
Juli/July	33,6	24,6	27,9	94,0	60,4	80,8
Agustus/August	33,9	24,8	28,3	90,8	56,2	76,7
September/September	33,6	24,2	27,7	92,5	60,8	80,9
Oktober/October	33,0	24,3	27,6	93,3	63,1	82,2
November/November	32,7	24,6	27,7	93,9	63,6	82,7
Desember/December	32,4	24,3	27,5	94,9	66,1	83,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data yg ada diatas dapat dilihat bahwa kelembabban udara tertinggi di kota Palembang pada tahun 2016 mencapai titik maksimum pada bulan mei yaitu sebesar 95,5%, sedangkan kelembaban udara terendah di kota Palembang tahun 2016 mencapai pada titik minimum pada bulan juli yaitu sebesar 60,4%. Dengan demikian rata-rata suhu kelembaban di kota Palembang tahun 2016 tertinggi ialah 85,4 °c pada bulan januari, sedangkan rata-rata suhu kelembaban terendah terjadi pada bulan agustus sebesar 76,7 °c.

4.1.2 Kependudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.602.071 jiwa yang terdiri atas 802.990 jiwa penduduk laki-laki dan 799.081 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,49 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2016 mencapai 3.999 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 16 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.137 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 916 jiwa/Km².

4.1.3 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 733.121 orang. Sementara untuk tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2015 sebesar 9,52 persen. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Palembang Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada tahun 2016 sebesar 5.234 pekerja. Dari 5.234 pekerja yang terdaftar sebesar 1.329 telah ditempatkan bekerja. Proporsi terbesar pencari

kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 42,93 persen (2.247 pekerja).

Dibawah ini adalah data tabel Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2016 dalam persen

Tabel 4.2
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2016

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(2)	(3)
1 Ilir Barat II	4,18	10 754
2 Gandus	3,93	916
3 Seberang Ulu I	11,18	10 273
4 Kertapati	5,36	2 017
5 Seberang Ulu II	6,28	9 408
6 Plaju	5,18	5 472
7 Ilir Barat I	8,57	6 941
8 Bukit Kecil	2,78	4 493
9 Ilir Timur I	4,52	11 137
10 Kemuning	5,38	9 573
11 Ilir Timur II	10,45	6 548
12 Kalidoni	7,02	4 029
13 Sako	5,76	5 118
14 Sematang Borang	2,37	1 026
15 Sukarami	10,39	3 233
16 Alang-Alang Lebar	6,65	3 083
Palembang	100,00	3 999

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilihat dari data tabel distribusi data kepadatan penduduk diatas bahwasanya distribusi penduduk di kota Palembang pada tahun 2016 yang paling besar jumlah persentasenya yaitu 11,18% di kecamatan Seberang Ulu I,

sedangkan distribusi yang terkecil persentasenya di kota Palembang pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37% di kecamatan Sematang Borong. Dengan total distribusi kota Palembang yaitu sebesar 100,0%.

Dan data kepadatan penduduk di kota Palembang pada tahun 2016 yang paling besar yaitu 11 137 km² di kecamatan Ilir timur I, sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil di kota Palembang tahun 2016 yaitu sebesar 916 km² di kecamatan Gandus. Dengan total kepadatan penduduk di kota Palembang yaitu sebesar 3999 km².

4.1.4 Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

4.1.4.1 Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, variabel-variabel seperti jumlah gedung sekolah, jumlah murid dan jumlah guru sering kali ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan. Misalnya dua variabel terakhir diatas dapat digunakan untuk menghitung rasio murid-guru. Pada tahun ajaran 2015/2016, Kota Palembang memiliki gedung sekolah sebanyak 683 sekolah yang terdiri atas 362 Sekolah Dasar (SD), 200 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 121 Sekolah Menengah Atas (SMA). Selama tahun ajaran 2015/2016, jumlah murid SD sebanyak 150.428 orang, SLTP sebanyak 88.675 orang, dan SMA sebanyak 48.435 orang. Jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah pada tahun 2015/2016 ini terdiri atas 8.192 guru Sekolah Dasar, 4.621 orang guru SLTP, serta 2.973 orang guru SMA.

4.1.4.2 kesehatan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 218,50 ribu orang (15 persen) dan terus mengalami penurunan menjadi 202,31 ribu orang (12,93 persen)

pada tahun 2014. Jumlah penduduk miskin mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 203,12 ribu orang (12,85 persen) pada tahun 2015. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hingga mencapai 191,95 ribu orang (12,04 persen). Secara umum, persentase penduduk miskin dari tahun 2010 sampai tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 12,04 persen.

4.2 Analisis Deskriptif Data

4.2.1 Analisis perkembangan indikator ekonomi sebelum terselenggaranya Asian Games di Palembang

Indikator ekonomi menjadi yang paling penting bagi Indonesia khususnya bagi setiap daerah, sehingga menjadi suatu fokus pemerintah pusat ataupun daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa indikator yang harus dilihat oleh pemerintah daerah yaitu, Laju Inflasi, PDRB dan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.1.1 Inflasi

Krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis ekologi, krisis energi, krisis pangan dan ancaman perubahan iklim yang tak terbendung yang terjadi di seluruh belahan dunia, turut pula dirasakan di Indonesia. Kota Palembang sebagai motor penggerak perekonomian Provinsi Sumatera Selatan juga terkena dampaknya. Inflasi Kota Palembang maupun secara nasional mengalami peningkatan seperti tersaji pada Tabel diatas, inflasi Kota Palembang berada sedikit diatas inflasi nasional selisih 0,02 lebih tinggi kota Palembang, dengan selisih inflasi yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah data tabel Laju inflasi tahun 2011-2016 di kota Palembang dalam persen

Tabel 4.2

Laju inflasi tahun 2011-2016 di kota Palembang

	Bulan Month	Tahun Years					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Januari January	0,82	0,17	0,64	1,07	-1,15	0,32
2	Februari February	-0,32	-0,44	0,71	-0,24	-0,48	-0,11
3	Maret March	-0,77	0,04	0,85	-0,20	0,31	0,22
4	April April	-0,28	0,49	0,44	-0,14	0,48	-0,19
5	Mei May	0,79	0,08	-0,41	-0,03	0,56	0,66
6	Juni June	0,65	0,69	1,18	0,54	0,39	0,46
7	Juli July	0,70	0,49	2,92	0,89	1,05	1,12
8	Agustus August	0,69	0,51	0,58	0,10	0,27	-0,26
9	September September	0,59	-0,29	-0,44	0,47	-0,38	0,24
10	Oktober October	0,50	0,41	0,83	0,80	0,19	-0,08
11	November November	0,02	0,24	-0,05	2,10	0,68	0,57
12	Desember December	0,35	0,32	0,04	2,75	1,12	0,67
Kumulatif/ Total		3,78	2,72	7,04	8,38	3,05	3,68

sumber: Badan Pusat statistic (BPS)

Dari tabel diatas dapat dilihat Inflasi Kota Palembang turun dari 8,38 persen di tahun 2014 menjadi 3,05 persen di tahun 2015 dan mengalami kenaikan 3,68 persen di tahun 2016. Inflasi tertinggi terjadi di bulan juli sebesar 1,12 persen pada tahun 2016 dan inflasi terendah terjadi di bulan oktober mencapai -0,8 persen di tahun 2016.

4.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur menilai gambaran dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini juga bermanfaat untuk mengetahui dan menilai pembangunan yang telah dicapai serta untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Berikut ini adalah data tabel Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 4.3
Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Lapangan Usaha <i>Industry</i>	2013	2014r)	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,86	8,91	2,93	4,86
2 Pertambangan dan Penggalian	4,90	7,82	12,70	5,38
3 Industri Pengolahan	3,28	4,17	6,14	3,02
4 Pengadaan Listrik dan Gas	9,03	12,18	2,16	15,95
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,34	5,13	6,67	1,08
6 Konstruksi	9,23	4,29	0,03	8,90
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,02	4,37	3,43	8,97
8 Transportasi dan Pergudangan	7,44	6,22	8,54	6,25
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	5,69	9,83	10,28
10 Informasi dan Komunikasi	6,12	8,16	8,68	6,87
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	9,57	5,10	8,19	8,28
12 Real Estate	9,00	7,26	7,10	8,15
13 Jasa Perusahaan	9,40	6,20	4,41	5,74
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,58	3,64	10,27	1,01
15 Jasa Pendidikan	9,94	15,71	7,90	2,89
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	9,48	7,29	1,24
17 Jasa Lainnya	2,39	3,10	4,05	2,52
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	5,85	5,25	5,45	5,76

sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dapat dilihat dari tabel diatas perekonomian berkembang pada tahun 2016 yaitu 5,76 persen, mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 perkembangannya 5,45persen dan ditahun 2014 perkembangannya 5,25 persen. Pertumbuhan yg paling tinggi dicapai oleh kategori perdagangan listrik dan gas sebesar 15,95 persen di tahun 2016 dan

pertumbuhan yang paling rendah dicapai oleh kategori pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 1,01 persen ditahun 2016.

4.2.1.3 Keuangan Pemerintah Daerah

iaya pembangunan terdiri dari dua sumber yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka otonomi daerah, sumber dana pembangunan dititikberatkan pada APBD.

Untuk meningkatkan APBD, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, antara lain :

- a. Rendahnya pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- b. Rendahnya laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Rendahnya peranan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah.

Berikut ini adalah data tabel Pengeluaran Pemerintah Daerah Tahun 2014-2016

Tabel 4.4
Pengeluaran Pemerintah Daerah Tahun 2014-2016

Jenis Pendapatan Source of Revenues	2014	2015	2016 (Anaudit)
(1)	(3)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Original Local Government Revenue	734 218 888 570,79	737 237 810 229,64	781 382 342 541,23
1.1 Pajak Daerah/ Local Taxes	463 574 599 5132	479 102 899 223,00	536 552 681 049,38
1.2 Retribusi Daerah/ Rebtributions	85 109 3 5 505,34	75 646 654 675,36	75 946 671 693,10
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	28 021 442 345,64	34 503 218 051,18	50 362 039 101,20
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/ Other Original Local Gov. Revenue	57 510 331 568,49	147 975 038 280,00	118 520 950 697,55
2. Dana Perimbangan/ Balanced Budget	1 646 294 773 722,00	1 481 824 826 600,00	1 883 738 788 642,00
2.1 Bagi Hasil Pajak/ Tax Sharing	95 284 667 535,00	72 512 59 50,00	110 420 544 869,00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam/ Non Tax/Natural Resources Sharing	86 805 369 187,00	96 888 502 350,00	74 007 376 608,00
2.3 Dana Alokasi Umum/ General Allocation Funds	1 203 662 459 000,00	1 210 604 984 000,00	1 292 04 896 000,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/ Special Allocation Funds	49 542 278 000,00	82 180 080 000,00	387 183 971 065,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/ Other Legal Revenue	849 621 008 311,48	604 481 718 207,62	477 762 380 887,87
3.1 Pendapatan Hibah/ Grants	12 362 166 242,00	10 153 213 200,00	209 218 176 258,63
3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ Tax sharing from province and other local governments	123 512 214 100,48	3 343 601 935,52	231 989 411 058,24
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/ Autonomous Region and Balancing	426 003 126 000,00	477 324 745 000,00	-
3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ Financial assistance from province and other local government governments	87 643 501 969,00	18 660 156 072,00	36 543 803 571,00
Jumlah/ Total	2 929 034 470 604,27	2 703 644 351 937,08	3 122 871 621 871,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Terdapat data dari tabel diatas Realisasi penerimaan daerah otonom kota Palembang tahun 2016 mencapai Rp.3.122.871.62197,10 tahun 2015 mencapai Rp. 2.703.644.351937,08 dan pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 2.929.034.470604,27. Penerimaan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengeluaran tersebut terbagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tak terduga.

4.3.2 Analisis perkembangan Pembangunan Sarana Infrastruktur Kota dan Sarana Transportasi di Palembang Sehubungan Akan diselenggarakannya Asian Games.

4.3.2.1 Infrastruktur dan Transportasi

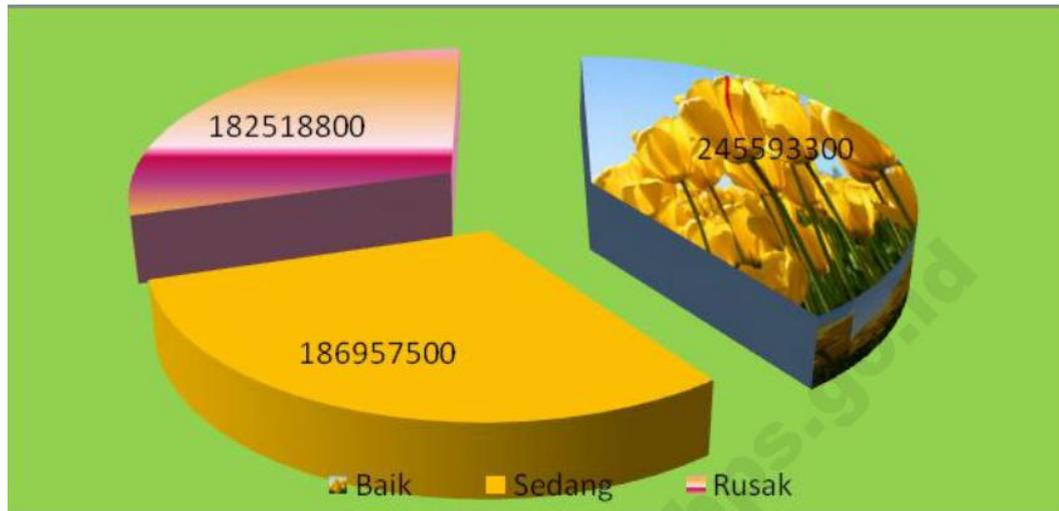
Perkembangan perekonomian yang cukup tinggi diiringi dengan tingkat mobilitas penduduk maka peranan pertumbuhan sangat dominan dalam merangsang dan menunjang pertumbuhan produksi barang dan jasa yang merupakan penghasil Devisa Negara. Sungai Musi selatan berfungsi sebagai sarana penghubung juga merupakan asset wisata utama kota Palembang, sehingga angkutan darat, laut, dan udara menjadi salah satu potensi utama kota Palembang. Pemerintah kota Palembang juga selalu berupaya memperbaiki jalan yang ada dan menamban jalan-jalan yang baru agar kelancaran lalu lintas tetap terjamin.

Pembangunan jalur kereta ringan (light rail transit) LRT dari bandara Sultan Badaruddin II hingga kompleks olahraga Jakabaring sepanjang 22 km. pembangunan tersebut saat ini sedang dikebut agar bisa digunakan sebelum Asian Games digelar, tidak hanya pembangunan LRT saja pembangunan hotel, restoran, dan transportasi kota juga dibangun. Pembangunan LRT ini dibuat untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan dalam pelaksanaan Asian Games 2018. Selain itu juga pembangunan LRT ditujukan untuk pemerataan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonominya.

Berikut adalah data grafik kondisi jalan di kota Palembang pada tahun 2015

Grafik 4.3

Kondisi jalan di kota Palembang Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data grafik di atas Kota Palembang dengan jumlah penduduk tengah tahun 2015 sebesar 1.580.517 jiwa, sebagian besar menggunakan transportasi darat yang mempunyai peranan sangat dominan. Transportasi darat ini berupa bus besar, bus sedang, bus kecil, mobil penumpang umum (MPU), dan taksi. MPU memegang peranan utama sebesar 1.541 unit. Bus sedang mengalami penurunan yang lumayan cukup tinggi yaitu dari 113 unit tahun 2013 menjadi 91 unit di tahun 2014. Sedangkan bus kecil masih tetap yaitu sebesar 441 unit tahun 2014, sedangkan bus besar untuk tahun 2014 ada sebanyak 5 unit yang beroperasi dalam kota Palembang, yaitu Bus Rapi Trans atau yang dikenal transmusi.

Disamping transportasi darat, transportasi udara juga memegang peranan yang cukup penting dalam arus lalu lintas barang dan penumpang. Penumpang yang datang ke Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II kurun waktu 2013 mencapai angka tertinggi di bulan Agustus sebesar 143.282 jiwa dan terendah di

bulan April sebesar 80.655 jiwa. Begitu juga dengan penumpang yang berangkat dari Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II mencapai angka tertinggi di bulan Agustus sebesar 148.839 jiwa dan terendah di bulan Juli sebesar 64.822 jiwa.

Dengan akan diselenggarakannya Asian Games 2018 di Palembang maka pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Palembang itu sendiri mempersiapkan segala macam kebutuhan yang akan menunjang terselenggaranya Asian Games 2018 ini dengan baik. Salah satu persiapan yang dilakukan ialah dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang memadai di Kota Palembang. Selain itu juga dengan membangun infrastruktur yang baik. Karena dengan pembangunan infrastruktur ini, maka juga akan menunjang pertumbuhan ekonomi di kota Palembang itu sendiri. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan ialah dengan membangun perhotelan, karena pada penyelenggaraan Asian Games 2018 akan banyak pendatang-pendatang yang akan menginap, sehingga perhotelan atau penginapan sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan acara ini. Di tahun 2017 ini, sudah terdapat 53 unit hotel, dengan jumlah kamar sebanyak 4.665 dengan fasilitas hotel berbintang 5 sebanyak 2 unit hotel.

Selain pembangunan hotel, pembangunan pariwisata juga sangat perlu diperhatikan Karena pariwisata merupakan salah ikon dari suatu kota/daerah sehingga akan menarik perhatian oleh turis-turis yang akan berkunjung. Dengan demikian maka akan meningkatkan Devisa Negara serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang itu sendiri maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam Analisa dampak ekonomi terhadap rencana penyelenggaraan Asian Games di kota Palembang penulis menggunakan model analisa data deskriptif. Dalam model analisa tersebut disebutkan terdapat dua faktor pendorong terbentuknya objektif keputusan yaitu faktor perkembangan indikator ekonomi sebelum terselenggaranya Asian Games di Palembang dan perkembangan pembangunan sarana infrastruktur kota dan sarana transportasi di Palembang . Faktor dominan yang mendorong kota Palembang sebagai penyelenggara Asian Games 2018. . Kepentingan yang hendak dicapai yaitu dampak ekonomi secara tidak langsung dan jangka panjang baik itu dari indikator ekonominya dan sarana transportasi di kota Palembang . Penyelenggaraan even Asian Games 2018 akan mendapat perhatian dari media pers termasuk pers internasional yang kemudian memungkinkan dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional.

Dengan pengalaman tersebut kota Palembang mendapat kepercayaan dari (*Olympic Council Of Asia (OCA)*) sebagai federasi olahraga Asia untuk menjadi penyelenggara Asian Games 2018. Kepercayaan tersebut seiring dengan kemampuan finansial dan ketersediaan infrastruktur olahraga dan akses publik di kota Palembang yang memadai.

Kota Palembang ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah selain jakarta penyelenggaraan Asian Games 2018 ini sebagai salah satu dari sekian banyak jalan untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut. Melalui acara ini

kemudian kota Palembang juga berkesempatan untuk menunjukkan diri mampu untuk menyelenggarakan acara *event* olahraga sebesar ini dan bahwa kota Palembang adalah kota yang aman untuk dikunjungi. Kemampuan kota untuk itu kemudian akan meningkatkan citra negara di mata internasional. Sebelum Asian Games 2018 digelar, adanya kegiatan-kegiatan pra *event* juga mampu menarik wisatawan ke Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus merupakan upaya untuk unjuk gigi untuk memperlihatkan kemampuan mengoptimalkan kekuatan nasional melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki.

Dengan hal-hal yang positif kota Palembang tentunya akan meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral, regional, maupun investasi. Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang akan membangun kepercayaan dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan menguntungkan dalam berinvestasi. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki peluang untuk menyelenggarakan even olahraga internasional lainnya seperti Olimpiade atau Piala Dunia.

5.2 Saran

Penulis berharap pemerintah Indonesia khususnya pemerintah di kota Palembang segera merumuskan dampak ekonomi dari Asian Games untuk kota Palembang. Pemerintah kota Palembang semestinya belajar dari penyelenggaraan sebelumnya di Korea Selatan dan Tiongkok. Korea Selatan dengan Busan pada penyelenggaraan Asian Games 2002 maupun Incheon pada penyelenggaraan Asian Games 2014 fokus utama adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus di Korea Selatan. Melalui penyelenggara Asian Games Korea Selatan mempercepat pembangunan di dua kota tersebut dari sisi ekonomi. Hal yang sama dilakukan

Tiongkok, sebagai tuan rumah Asian Games 1990 di Beijing, 2010 di Guangzhou, dan 2022 mendatang di Hangzhou. Korea Selatan dan Tiongkok mampu menjadikan *event* Asian Games juga bisa menjadi daya tarik investasi dan berkesan kepada seluruh masyarakat dunia yang menyaksikan.

Event Olahraga terbesar se-Asia tentu Indonesia harus mengeluarkan dana yang besar perlu kiranya persiapan yang lebih matang. Maka dengan merumuskan manfaat strategis yang akan berdampak terhadap ekonomi daerah maka Indonesia bisa lebih terarah dalam mencapai keuntungan dalam penyelenggaraan Asian Games. Karena pemerintah kota Palembang secara umum akan mengkaji dampak ekonomi apakah memberikan keuntungan bagi kota Palembang atau tidak. Baik itu berpengaruh pada indikator ekonomi ataupun sarana infrastruktur dan transportasi.

Bagi mahasiswa Hubungan Internasional diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan guna meneliti hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara. Sehingga konsep dan fakta yang terdapat dalam penelitian ini membantu penelitian selanjutnya dalam melihat kepentingan nasional negara dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi olahraga internasional. Penulis juga berharap pada penelitian berikutnya terdapat temuan mengenai kepentingan nasional dalam sebuah mega *sports event* lainnya yang diselenggarakan di Indonesia. Sehingga untuk kedepannya bisa dijadikan pelajaran dan bahan pertimbangan untuk merumuskan kepentingan negara dalam penyelenggaraan sebuah mega *sports event*

DAFTAR PUSTAKA

Donald V.L. Macleod, *Tourism, Globalisation and Cultural Change: An Island Community Perspective*, The Cromwell Press, Inggris, 2004.

<https://bps.go.id/>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5608/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://palembangkota.bps.go.id/>

John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

Kompasiana (2017), https://www.kompasiana.com/berlianaagstn/pembangunan-untuk-asian-games-positif-atau-negatif_5729d4b0ce7e619d073b6b8e

Mankiw, N.G. 2006. *Teori Makroekonomi*. Erlangga, Jakarta.

Tanjunghapsari (2016), <https://kumparan.com/vanny-dwi-purnama/dampak-asian-games-2018-terhadap-perekonomian-palembang>

RS Abdul (2016), *Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Penyelenggaraan ASEAN Games 2018*.

Sukirno (2010), *Ekonomi Mikro Pembangunan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Yohan (2012), *Dampak Penyelenggaraan Event piala Eropa (UEFA EROPA) terhadap ekonommi dan politik di Ukraina*.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Maret 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Ekonomi pembangunan menerangkan bahwa :

N a m a : FITRI LARASSATY

N .P.M. : 1405180019

Tempat / Tgl.Lahir : Seamrang, 29 Februari 1996

Alamat Rumah : Ileng Link.I Rengas Pulau

JudulProposal :ANALISIS PENGARUH AKAN TERSELENGGARAYANYA ASEAN GAMES TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DI PELAMBANG

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki judul (ANALISA Dampak Ekonomi Terhadap Penyelenggaraan ASIAN Games di kota Palembang.
Bab I	-
Bab II	- lengkapi teori
Bab III	- Perbaiki metode analisis
lainnya	
simpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis 02 Maret 2018

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan *Ekonomi Pembangunan* yang diselenggarakan pada hari *Kamis* tanggal *02 Maret 2018* menerangkan bahwa:

Nama : FITRI LARASSATY
N .P.M. : 1405180019
Tempat / Tgl.Lahir : Semarang, 29 Februari 1996
Alamat Rumah : Ileng Link.I Rengas Pulau
JudulProposal :ANALISIS PENGARUH AKAN TERSELENGGARAYANYA ASEAN GAMES TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DI PELAMBANG

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.*

Medan,Kamis 02 Maret 2018

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.

Pembanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan

Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

16/03/18

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU
Di

Medan.....H
M

Medan.



Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fhri Larassaty
NPM : 1405100019
Konsentrasi :
Kelas/Sem : 7B IEP
Alamat : Jl. Leng. Unik 1 Pengas purau

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : Lailan Safina disetujui Prodi : (.....)

Dari hasil survei di masyarakat dan lapangan, serta Institusi Pemerintah dan Swasta dalam penelitian serta proses pembimbingan maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Terjadinya kemacetan di Palembang akibat pembangunan LRT.
2. Banyaknya jalanan bagi masyarakat di Palembang rusak akibat pembangunan Infrastruktur
3. Akibat pembangunan LRT maka puluhan pohon harus ditebang dan hal ini mengakibatkan kondisi di Palembang menjadi panas dan gersang.

Dengan demikian rencana judul yang disetujui ketua program studi adalah :

Analisis Pengaruh Akan diselenggarakannya ASEAN Games Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Palembang

Medan..... 29 Desember 2017

Dosen Pembimbing


(Dr. Lailan Safina, M.Si)

Peneliti/ Mahasiswa


(Fhri Larassaty)

Disetujui Oleh :

Ketua / Sekretaris Prodi


(Dr. Prayudha Hariani RS)

Diagendakan Pada Tanggal : 26 Februari 2018
Nomor Agenda : 263 / 12 / EP / 17

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diagendakan paling lama 1 (satu) bulan setelah di paraf oleh ketua program studi.
2. Seminar Proposal paling lama 1 (satu) bulan setelah judul diagendakan.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fitri Larassaty
NPM : 1405180019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeuarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, *27 Febuari* 2018

Pembuat Pernyataan



Fitri Larassaty

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 1972TGS / II.3 / UMSU-05 / D / 2018

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan **EKONOMI PEMBANGUNAN** Tanggal 02 Maret
2018, Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : **FITRI LARASSATY**
N P M : **1405180019**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **EKONOMI PEMBANGUNAN**
Judul Skripsi : **ANALISA DAMPAK EKONOMI TERHADAP
PENYELENGGARAAB ASIA GAMES DI KOTA PALEMBANG**

Pembimbing : **Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **19 Maret 2019**

Ditetapkan di: MEDAN

Pada Tanggal : 02 Rajab 1439 H
19 Maret 2018 M

Wassalam
Dekan



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.

